

© 2004 Zefri  
Makalah pribadi  
Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702)  
Sekolah Pasca Sarjana / S3  
Institut Pertanian Bogor  
June 2004

Posted 4 June 2004

Dosen:  
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (penanggung jawab)  
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto  
Dr Ir Hardjanto

## **PERSPEKTIF USAHA KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI PILIHAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH**

Oleh:

**Z E F R I**

P15600003/PWD

[zefri@wowmail.com](mailto:zefri@wowmail.com)

### **ABSTRAK**

*Kebijaksanaan dalam pembangunan ekonomi wilayah biasanya timbul antar daerah untuk mencapai keseimbangan kondisi sosial-ekonomi. Kesesuaian tujuan dalam kebijakan yang dibuat selalu mengacu kepada ukuran kepentingan dari setiap daerah, atau lebih menekankan pada faktor keuntungan (benefit). Untuk mengetahui perkembangan suatu daerah dapat dilakukan beberapa pendekatan model, misalnya bentuk, efisiensi kerja, masalah transportasi, masalah penggunaan lahan, masalah pembangunan daerah perkotaan dan wilayah, alokasi sumberdaya manusia, harga lahan dan keseimbangan dari suatu lokasi.*

*Pembangunan wilayah diarahkan pada adanya nilai pemerataan (equity), pertumbuhan (eficiency) dan kontinuitas (sustainability). Pembangunan ini dapat mengacu kepada apa yang disebut dengan dalil fundamental ekonomi kesejahteraan (The second fundamental of welfare economics).*

*Usaha Pengembangan UKM dalam perspektif pembangunan wilayah saat ini dan akan datang perlu beberapa hal antara lain : 1) Peran pemerintah pusat akan dibatasi pada penyediaan barang-barang publik dan bidang-bidang kerja yang terkait dengan hubungan luar negeri. 2) Pembangunan wilayah lebih beorientasi pada sektor usaha yang mengarah pada pertanian, misalnya usaha agroindustri.*

*Untuk mewujudkan pembangunan wilayah dalam konteks otonomi daerah dapat dilakukan dengan melalui proses mobilisasi sumberdaya*

*ekonomi, yaitu sumberdaya lahan, sumberdaya manusia, teknologi, modal dan sumberdaya sosial bagi mereka yang melakukannya. Melalui fasilitas infrastruktur kelembagaan yang ada di daerah perkotaan, misalnya perbankan agar memberikan peluang berusaha yang lebih besar bagi pengusaha untuk menginvestasikan modalnya di daerah perdesaan.*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun telah mengakibatkan suatu proses yang berantai dari krisis ekonomi antar dan antar negara, dari satu kawasan ke kawasan lain, dari antar wilayah ke wilayah lain. Indonesia adalah salah satu negara yang paling parah akibat dari resesi ekonomi.

Resesi ekonomi yang dihadapi Indonesia diawali dengan merosotnya nilai mata uang rupiah terhadap beberapa mata uang asing dan telah menyebabkan berubahnya secara total tatanan perekonomian dalam skala makro dan skala mikro. Ketidaksiapan dunia usaha dalam skala besar telah menimbulkan timpangnya neraca pembayaran maupun neraca perdagangan antara wilayah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif.

Belajar dari krisis yang ada dapat dibuktikan bahwa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah merupakan suatu yang survive dibandingkan dengan usaha besar.

Dalam rangka pemberdayaan perekonomian rakyat, pilihan yang paling tepat adalah adanya suatu kebijakan dari pemerintah untuk memberdayakan UKM dalam konteks yang lebih luas terutama masyarakat ekonomi lemah dan perdesaan. Pemberdayaan sumberdaya manusia dan alam dilingkungan wilayah perdesaan sekaligus akan dapat menunjang pelestarian alam dari kelangkaan lingkungan yang bersih dan terjaga secara berkesinambungan.

Populasi UKM dan Koperasi yang mencapai lebih dari 10% dari jumlah penduduk Indonesia (BPEN, tahun 2002) adalah kelompok potensial sebagai penggerak perekonomian nasional. Keberadaan koperasi dan pengusaha kecil menengah yang tersebar merata diseluruh pelosok tanah air adalah merupakan aset bangsa sekaligus menjadi poros perekonomian nasional.

Kegiatan yang selama ini berorientasi pada arah horizontal (inward looking) memerlukan transformasi kearah vertikal (outward looking) pasar luar negeri. Sebagai sumber kekuatan ekonomi bangsa koperasi dan UKM perlu ditambah wawasannya agar mampu bersaing dipasar global. Perkembangan pasar global terjadi setiap saat dan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam upaya menopang kegiatan koperasi dan UKM yang mengarah kepada pasaran luar negeri diperlukan upaya-upaya tertentu yang menjadi tanggung jawab bersama dengan cara : (1) Meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dan menengah (2) Pengembangan jangkauan wilayah pemasaran (3) Meningkatkan kredibilitas (4) Mempertahankan hubungan dagang yang

sudah berjalan (5) Memberikan kepastian kepada pembeli tentang kualitas (6) Memasukkan produk ekspor dari UKM kedalam bentuk teknologi informasi (7) Mengusahakan lisensi atau pengakuan suatu wilayah.

## **B. Peranan dan Kebijakan UKM dalam Pembangunan Ekonomi Wilayah**

Dalam upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah khususnya sebelum krisis, telah dikeluarkan suatu perangkat hukum tentang usaha kecil yang mencakup antara lain aspek pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dibidang produksi, pembinaan dan pengembangan dilakukan melalui peningkatan kemampuan manajemen serta teknik produksi. Bidang pemasaran dilakukan dengan melaksanakan penelitian dan pengkajian pasar, menyediakan sarana serta dukungan promosi.

Kapasitas usaha kecil dan menengah sebelum krisis dapat mencapai rata-rata 74%, setelah krisis mengalami penurunan hingga 40%. Usaha peningkatan utilitas kapasitas produksi ini perlu segera dilakukan pemberdayaan bagi UKM yang berorientasi ekspor.

Upaya peningkatan ekspor adalah merupakan penggerak pembangunan nasional, sektor usaha kecil dan menengah telah terbukti cukup tangguh menghadapi krisis dibandingkan dengan pengusaha besar dan konglomerat. Peranan UKM terhadap PDB Nasional maupun terhadap ekspor telah menunjukkan nilai yang signifikan. Data BPS peran UKM pada sektor pertanian tahun 1998 adalah lebih dari 95%. Pada sektor pertambangan dan penggalian peran UKM adalah 10%. Industri pengolahan 35%, listrik, gas dan air bersih 9%. Secara keseluruhan peran UKM dalam PDB nasional adalah sekitar 40%.

Kebijakan dalam pembangunan ekonomi wilayah biasanya timbul antar daerah untuk mencapai keseimbangan kondisi sosial-ekonomi.

Kesesuaian tujuan dalam kebijakan yang dibuat selalu mengacu kepada ukuran kepentingan dari setiap daerah, atau lebih menekankan pada faktor keuntungan (benefit). Untuk mengetahui perkembangan suatu daerah beberapa dekade terakhir ini dapat digunakan dengan pendekatan model, misalnya bentuk, efisiensi kerja, masalah transportasi, masalah penggunaan lahan, masalah pembangunan daerah perkotaan dan wilayah, alokasi sumberdaya manusia, harga lahan dan keseimbangan dari suatu lokasi, misalnya program non linier, linier, input-output, gravitasi dan model lainnya.

Permasalahan yang utama dalam pembangunan wilayah khususnya daerah perkotaan adalah pertumbuhan penduduk, masalah kemacetan, kriminal, sarana dan prasarana dan tenaga kerja.

Ada dua hal yang dominan dalam masalah perkotaan menurut Nijkamp yaitu; 1) Adanya kecenderungan dari negara-negara industri penurunan jumlah penduduk akibat adanya proses sub-urbanisasi dan deurbanisasi. 2) pertumbuhan tenaga kerja di kota-kota (peri-peri)sangat tinggi.

Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah mengapa kota-kota menjadi sangat penting dalam hal dinamika daerah. Keberadaan pusat-pusat kota yang cukup besar nampak menjadi kondisi yang diperlukan (meskipun tidak selalu mencukupi) untuk masa-masa transisi dari perekonomian berdasarkan pertanian menjadi perekonomian yang lebih maju dengan tingkat produktifitas tinggi dan meluasnya aktifitas-aktifitas produktif. Pertanyaan sekarang bukan mengapa kota-kota itu ada, tetapi mengapa mereka mampu menentukan arah pembangunan daerah dan nasional.

Pertama-tama, yang perlu diketahui adalah adanya aspek kosmopolitan yang bersifat relatif pada kota-kota besar, yaitu pemahaman daerah terhadap dunia luar. Ide, barang-barang dan prosedur (tatacara) 'asing', memiliki kontribusi terhadap pembangunan yang bahkan pada daerah yang sangat maju khususnya kota-kota, sebagai entrepot untuk transfer antar daerah, adalah merupakan tempat utama dimana input-input yang sangat penting tersebut memperoleh pengakuan. Aspek di atas dari pada kota-kota adalah sangat jelas pada negara-negara yang kurang berkembang, dimana kota-kota utama dengan mengesankan memiliki kemiripan dengan mitra (counterpart) di negara-negara maju.

Terlepas dari fungsi hubungan antara daerah, kota-kota menjalani peranan penting dalam proses pembangunan, dengan menempatkan orang-orang dari bagian-bagian lain dari suatu daerah yang sama-sama diarahkan pada kepadatan dan kondisi hidup yang sangat berbeda (heterogen). Pandangan dan tradisi lama yang tetap ada di kawasan hinterland cenderung menjadi lebih cepat lenyap/larut di kota-kota heterogen (urban melting-pot); akibatnya selalu mendukung terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang lebih cepat, meskipun hal tersebut sering menyakitkan dan merusak dalam kaitannya dengan kepuasan seseorang, tertib sosial dan penyesuaian politik (political adjustment). Pengaruh urbanisasi yang menjadi lebih penting pada negara-negara yang berpenduduk padat, merupakan kecenderungan yang saling memperkuat terhadap keluarga yang lebih kecil dan juga terhadap partisipasi yang lebih besar dari tenaga kerja. Karena bagi penduduk yang bekerja umumnya, urbanisasi menggambarkan keterbukaan pada cara hidup dimana pekerjaan lebih terjadwal dan teratur, transaksi uang (monetized transactions) memiliki peranan lebih besar daripada hubungan impersonal.

Perhatian atas hal tersebut lebih jauh lagi menjelaskan mengapa kota-kota (khususnya kota besar yang jauh dari jangkauan kontak eksternal), telah menjadi tempat persemaian inovasi; dalam istilah ekonomi, hal tersebut terdiri atas peristiwa teknik-teknik baru, produk baru, dan perusahaan baru. Tempat tersebut menyediakan keterbukaan bagi ruang lingkup ide dan persoalan yang lebih luas yang melahirkan solusi. Kota-kota tersebut menggambarkan konsentrasi besar jumlah konsumen dan supplier yang sebagian besar menerima produk dan peralatan-peralatan baru. Ia juga menyediakan diversifikasi suplai keahlian (skill) dan pendukung pelayanan yang memungkinkan produsen untuk memulai dari kecil dan berkonsentrasi nyaris pada fungsi-fungsi yang lebih spesialis. Ia juga

menyediakan kondisi sosial dan iklim bisnis dimana kendala-kendala tradisi dan juga kelembaban personal (personal inertia) dikurangi, inisiatif dan juga inovasi menimbulkan prestise. Dimana pada innovator dapat belajar lebih banyak dari pergaulan setiap harinya dengan para pesaing (competitor) serta dengan sangat mudah memilih akumulasi keterampilan yang ada (tersedia), memanfaatkan temuan tidak hanya muncul di dalam kota tempat kediamannya juga ditempat-tempat lain.

Kebanyakan kota-kota merupakan tempat dimana bentuk-bentuk kegiatan terbaru dapat dengan sangat mudah memperoleh dukungan di dalam suatu daerah atau negara, dan kemunculan industrialisasi pada negara-negara kurang berkembang umumnya disertai oleh ledakan pertumbuhan pada pusat-pusat yang paling besar dan perbedaan sosial-ekonomi yang tinggi antara pusat-pusat kota dan kawasan-kawasan pinggir yang terpencil. Akan tetapi begitu pembangunan berjalan, dua hal terjadi.

Beberapa industri baru yang sensitive (infant industry) dimasa lalu mencapai kematangan (maturity). Percobaan dan produk mereka menjadi lebih dikenal di pasar yang lebih luas. Sebagai akibatnya, kegiatan-kegiatan mereka menjadi tidak bergantung pada keunggulan khusus yang disediakan oleh kota-kota besar. Kiasannya adalah seperti seekor anak burung siap untuk meninggalkan sarangnya. Pada saat yang sama, dukungan positif untuk mendesentralisir keluar dari pusat kota besar pertama cenderung meningkat. Dengan pasar produk yang lebih besar dan lebih luas, suatu pola lokasi yang terdiri dari sejumlah pusat-pusat produksi daerah menawarkan penghematan dalam ongkos distribusi tanpa pengorbanan sia-sia pada skala perekonomian (economics of scale).

Kelompok-kelompok eksternal ekonomi menjadi tidak begitu penting dengan bertambahnya sumber daya keuangan dan teknis daripada perusahaan dan juga peningkatan standarisasi proses dan produk. Upah tenaga kerja dan input local lainnya pada tempat permulaan kota besar sekarang nampak tidak mesti tinggi dalam hubungannya dengan biaya input tersebut pada tempat-tempat yang lebih kecil. Dan di pusat-pusat semula dimana industri berkembang, kematangan (maturity) dalam beberapa hal dapat berarti perkembangan rigiditas (kekakuan) dan hilangnya inisiatif akibat umur lanjut (penuaan) daripada pemimpin bisnis dan tenaga kerja. Tumbuhnya praktek-praktek depensif untuk mempertahankan hak-hak senioritas, merasakan kesusahan memperoleh keahlian tetapi usang, kedudukan kekuasaan dan keuntungan kumulatif lainnya. Oleh karena itu, kota yang merencanakan industri dan memandang hal tersebut melalui infancitasnya (keorokan) mungkin kehilangannya bersamaan ketika industri tersebut tumbuh.

Proses evolusi yang digambarkan di daerah perkotaan dalam hubungannya dengan perubahan lokasi yang menyertai kelahiran, infancitas, dan maturitas suatu kegiatan merupakan hal yang sangat menyolok. Wilbur Thomson telah menunjukkan hal ini dalam kaitannya dengan "teori rembesan kebawah (filter-down theory) dari lokasi industri" dan 'pertumbuhan memutar daerah perkotaan'. Sebagaimana dijelaskannya, bahwa New York telah kehilangan hampir semua industri yang pernah

dimilikinya 'penggilingan tepung, pengecoran logam, pabrik pengemasan daging, pabrik tekstil, dan penyamakan. Pittsburgh mempelopori dan kemudian tidak memiliki keunggulan untuk jangka waktu lama dari kebanyakan industri penyulingan minyak, aluminium, mesin elektrik dan logam.

Secara historis, kota-kota besar ditandaikan oleh suatu ketidakseimbangan komponen daripada pertumbuhan industri-industri baru dan kecil dalam keragaman aktifitasnya, oleh karena itu umumnya mereka gagal untuk mempertahankan dukungan kegiatan mereka yang terjadi pada periode permulaan. Kota-kota (city) dan kampung (town) yang lebih kecil, dan daerah-daerah yang kurang maju, nampak lebih memperlihatkan hasil-hasil daya saing, dalam arti peningkatan sumbangan mereka terhadap keseluruhan ketenagakerjaan (employment) nasional pada kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan disana; namun demikian pertumbuhan di kawasan ini secara historis mandeg oleh kenyataan bahwa keragaman aktifitas mereka sering dikendalangi/dipengaruhi oleh pertumbuhan yang lamban dan upah kerja yang rendah.

RD Norton dan J. Rees telah melakukan analisa yang luas mengenai perubahan pada pola-pola pertumbuhan keruangan (special patterns of growth) pada bidang manufaktur. Penelitian mereka menunjukkan bahwa daerah-daerah inti lebih lama bertahan mundur secara relatif memberikan kesempatan kepada kemunduran absolute pada pekerjaan-pekerjaan manufaktur setelah tahun 1969. Mereka menghubungkan kecenderungan ini dengan dua factor yaitu : (1) akselerasi pada tingkatan proses produksi yang menjadi agak terstandarisasi telah berpindah dari wilayah inti ke wilayah pinggiran (periphery), dan (2) desentralisasi kemampuan inovasi nasional, sehingga beberapa industri yang baru tumbuh dan cepat menjadi kurang terkonsentrasi di wilayah inti.

Jadi proses evolusi yang telah kita gambarkan, dimana pertumbuhan disalurkan/didistribusikan kebawah hirarkhi perkotaan, memiliki perkembangannya sendiri. Tingkat relatif pertumbuhan daripada kebanyakan kota-kota versus kawasan yang lebih kecil tergantung pada pentingnya ukuran seberapa cepat perembesan atau penyebaran kematangan (maturity) berlangsungnya aktifitas perkotaan dibandingkan dengan aktifitas perkotaan baru pada tahap permulaannya.

Dengan menggunakan kata-kata Thomson, perkembangan yang lebih cepat pada kawasan yang lebih kecil, kurang berkembangnya kawasan perkotaan nampak "membutuhkan bahwasanya hal itu menerima industrinya masing-masing berturut-turut sedikit lebih awal dalam siklus kehidupannya, untuk mencapaikan industri yang tepat waktu pada saat keduanya masih memiliki kedua hal berikut, yaitu substansi bentuk pekerjaan potensial dan pekerjaan dengan keahlian tinggi. Tambahan lagi, saat sekarang ini terlihat bahwa proses perembesan kebawah secara keseluruhannya kurang penting, karena inovasi dan konsentrasi tinggi perkembangan cepat kegiatan-kegiatan dengan sendiri kurang menandai pertumbuhan di kawasan metropolitan nasional yang paling besar.

### C. Perspektif UKM dalam Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah diarahkan pada adanya nilai pemerataan (equity), pertumbuhan (eficiency) dan kontinuitas (sustainability). Pembangunan ini dapat mengacu kepada apa yang disebut dengan dalil fundamental ekonomi kesejahteraan (*The second fundamental of welfare economics*) (Affendi Anwar, 2002).

Usaha Pengembangan UKM dalam perspektif pembangunan wilayah saat ini dan akan datang perlu beberapa hal antara lain :

- dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka peran pemerintah pusat akan dibatasi pada penyediaan barang-barang publik dan bidang-bidang kerja yang terkait dengan hubungan luar negeri. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu kejelasan hak (*property right*) dari setiap daerah yang semula terpusat (sentralisasi) ke arah desentralisasi.
- Pembangunan wilayah lebih berorientasi pada sektor usaha yang mengarah pada pertanian, misalnya usaha agroindustri atau bentuk UKM lainnya yang berbasis pada pertanian.

#### 1. Implementasi UKM dalam Pembangunan Wilayah

Untuk mewujudkan pembangunan wilayah dalam konteks otonomi daerah dapat dilakukan dengan melalui proses mobilisasi sumberdaya ekonomi. Mobilisasi sumberdaya ekonomi adalah upaya penggalan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi, yaitu sumberdaya lahan, sumberdaya manusia, teknologi, modal dan sumberdaya sosial bagi mereka yang melakukannya. Langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana dapat menjadikan daerah perdesaan menjadi “kota-kota” kecil dan menengah di daerah perdesaan yang berbasis pada pertanian dan agroindustri serta perdagangannya, melalui fasilitas infrastruktur kelembagaan yang ada di daerah perkotaan, misalnya perbankan agar memberikan peluang berusaha yang lebih besar bagi pengusaha untuk menginvestasikan modalnya di daerah perdesaan.

#### 2. Mobilisasi sumberdaya ekonomi

Fakta menunjukkan bahwa penguasaan sumberdaya yang ada hanya dinikmati hanya segelintir orang (konglomerat). Penguasaan ini telah menimbulkan ada pilihan-pilihan masyarakat untuk dapat mengatur wilayahnya masing-masing dan cenderung pada kondisi integrasi seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya dan Riau. Kecenderungan ini akan memberi dampak pada tindak kekerasan. Fakta juga menunjukkan bahwa sumberdaya yang dikuasai tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menguasainya, sehingga menimbulkan inefisiensi sekaligus menutup akses kelompok masyarakat lain yang lemah terhadap sumberdaya tersebut yang menimbulkan kerugian sosial yang tinggi.

Upaya untuk menghilangkan inefisiensi adalah dengan mobilisasi sumberdaya melalui redistribusi aset melalui musyawarah antara pemilik dan penggarap yang difasilitasi oleh pemerintah. Mobilisasi

sumberdaya ekonomi diarahkan pada peningkatan kesempatan kerja dan pemerataan.

#### **D. Konvergensi Antar Daerah.**

Konvergensi yang disebabkan oleh perbedaan income daerah akan kelihatan menjadi hasil-hasil alamiah dari pembangunan bertahap dan maturasi (kematangan) kawasan batas pemukiman, pengurangan yang cukup besar atas pentingnya pertanian sebagai suatu cara kehidupan, perbaikan transportasi dan komunikasi, dan peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal, munculnya lebih banyak kegiatan yang berorientasi pada SDA, dan karenanya menikmati suatu pilihan yang lebih luas atas lokasi-lokasi yang memungkinkan. Peningkatan perdagangan antar daerah yang dihasilkan oleh perbaikan transport dapat mendorong konvergensi dimana memungkinkan daerah-daerah menyumbangkan (share) dalam jumlah yang lebih besar manfaat produksi perekonomian daerah lainnya.

Arus modal antar daerah juga dapat menjadi tidak stabil yang menyebabkan terjadinya perpindahan kegiatan-kegiatan pekerjaan sebagai factor penyeimbang, hanya untuk tingkatan tertentu, dimana aktifitas-aktifitas utamanya berorientasi pada suplai tenaga kerja, sehingga modal menyebabkan penurunan upah daerah. Akibatnya kemudian, perubahan pada produksi dan tranfer teknologi, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, aglomerasi ekonomi dan faktor-faktor lokasi lainnya dapat mempersempit atau memperluas perbedaan pendapatan sesuai keadaan. Sebagai contoh seandainya aglomerasi ekonomi memaksakan pengaruhnya secara kuat terhadap pergerakan modal, maka daerah menyadari bahwa perekonomian akan tumbuh dengan sangat cepat, kemudian menciptakan lagi aglomerasi ekonomi dan mendorong kontinuitas pertumbuhan.

Suatu model yang dikembangkan oleh Moheb A Ghali dkk, menggambarkan pertumbuhan ekonomi di daerah Amerika adalah sebagaimana dijelaskan/diterangkan oleh pertumbuhan input modal dan tenaga kerja. Dalam model ini perpindahan antar daerah factor-faktor produksi ditentukan oleh perbedaan pendapatan daerah dan perbedaan dalam hal tingkat pertumbuhan output, yang mereka gunakan sebagai proxy kesempatan/peluang kerja. Penelitian ini mampu menentukan secara empiris bahwa factor-faktor perpindahan (movement factor's) cenderung menjadi sama bagi daerah-daerah di Amerika. Sedangkan untuk kasus Indonesia, dengan menggunakan model yang sama, Soeroso menemukan bahwa perpindahan factor-faktor antara daerah mendorong divergensi pendapatan. Pada kedua kasus, tanggapan atas perbedaan besar pendapatan adalah positif. Meskipun respon tersebut lebih lemah di Indonesia dibandingkan dengan di Amerika, tetapi hal tersebut bagi keduanya memiliki pengaruh pestabilan. Bagaimanapun juga, di Indonesia perbedaan pada tingkatan pertumbuhan output memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap perpindahan/pergerakan factor-faktor dan memberikan sumbangan bagi melebarnya perbedaan pendapatan; (dimana) kawasan yang lebih makmur tumbuh dengan sangat cepat dan menarik sumber daya produktif, dalam suatu proses kumulatif dan tidak tetap.



Perubahan pada bentuk permintaan atas barang dan jasa, dapat mempengaruhi perbedaan pendapatan dalam arah lain. Sebagai contoh, secara praktis kecenderungan dunia atas permintaan akan produk pertanian tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan permintaan akan produk manufaktur dan jasa-jasa yang dalam perekonomian yang telah maju kelihatannya lebih mirip daripada tidak adanya perluasan perbedaan pendapatan antara di kawasan pertanian dan di kawasan industri dan perkotaan.

Richard Easterlin menyatakan; Sama sekali bukan merupakan kemestian bahwa tingkat pendapatan regional merupakan hasil yang tidak terelakkan dari proses pembangunan. Karena begitu migrasi dan perdagangan nampak menggunakan tekanan yang cukup berarti terhadap konvergensi, mereka (keduanya) berjalan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat dimana factor-faktor dinamis mungkin saja menghapuskan pengaruh mereka. Tentu saja, siapapun boleh berasal, bahwa migrasi dan perdagangan dapat menjadi semakin lebih penting lagi selama periode pertumbuhan, merupakan suatu hasil, sebagai contoh, dari perbaikan-perbaikan transportasi, dan oleh karena itu tekanan-tekanan terhadap konvergensi akan cenderung makin menonjol. Akan tetapi hal ini secara umum merupakan kasus yang tidak dapat ditetapkan atas dasar-dasar apriori'.

Perhatian atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksamaan (inequality) pendapatan regional menggiring kita kepada hipotesa menarik berkenaan dengan hubungan konvergensi dan divergensi secara sistematik terhadap tahapan-tahapan proses pembangunan. Khususnya, tahap-tahap permulaan pembangunan ekonomi nasional berkaitan dengan peningkatan disparitas pendapatan regional, sementara itu tingkat pendapatan regional cenderung terkonvergensi pada pembangunan ekonomi nasional yang lebih matang.

Pada masa sekarang, hal terpenting dari apa yang kita sebut sebagai pembangunan dan pencapaian kemajuan atas dasar kemandirian (self-sustaining progress) adalah suatu transisi dari perekonomian berdasarkan agraris menjadi perekonomian yang berbasiskan kegiatan sekunder dan tertier, yang disertai dengan urbanisasi. Suatu perbedaan yang luas terdapat diantara perekonomian yang baru berkembang dengan yang telah lama, yaitu berkenaan dengan tingkat pendapatan, cara hidup dan factor lokasi.

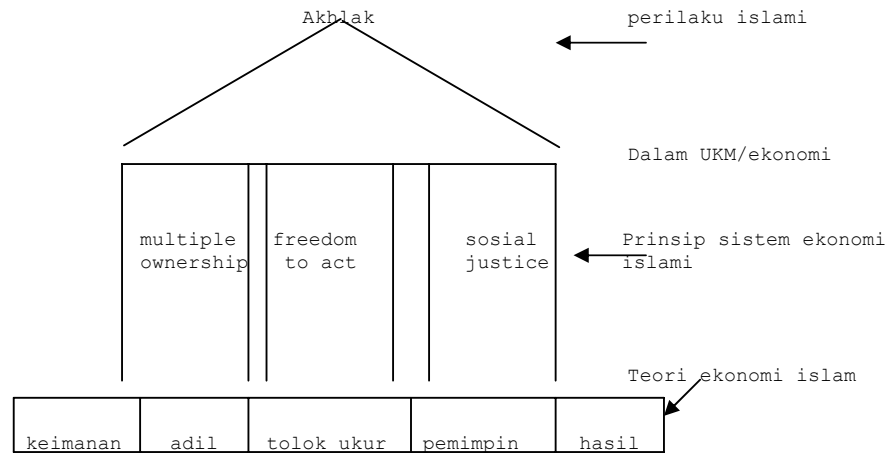
Pada tahap permulaan industrialisasi, bagian terbesar dari peningkatan pada keseluruhan produktifitas dan pendapatan perkapita berasal dari perubahan campuran daripada, yaitu bertambah pentingnya sector non pertanian dalam kaitannya dengan sector pertanian. Aktifitas-aktifitas baru tidak dapat mengakar kemana-kemana sekaligus, melainkan pada permulaannya sangat terkonsentrasi pada beberapa kota-kota kunci 'umumnya merupakan tempat-tempat yang sangat aktif melakukan hubungan dengan negara-negara yang lebih maju dan tempat yang memiliki penduduk yang lebih besar serta tersebar. Pada tahapan pembangunan ini, sebagian besar daerah masih kurang merasakan perlunya potensi pasar local dan keperluan akan input-input lokal untuk melibatkan/menggunakan

pola-pola kegiatan baru yang kurang dikenal. Migrasi nampak menjadi berat dari kawasan belakang menuju kota-kota industri. Migrasi demikian sangat selektif, dan secara keseluruhan selektifitas ini merugikan kawasan-kawasan yang mengalami out-migrasi (migrasi keluar). Akibat pada tahap selanjutnya, peningkatan aglomerasi (progressive agglomeration) daripada industri-industri modern pada kawasan ibukota-ibukota dan penitikberatan (aksentuasi) terhadap perbedaan regional dalam hal struktur perekonomian, produktifitas dan pendapatan. Kondisi demikian telah terjadi di Amerika pada periode divergensi antara tahun 1840-1880, yang diperpanjang oleh akibat pengaruh destruktif daripada perang sipil terhadap perekonomian daerah selatan; hal demikian saat ini terjadi pada banyak negara dunia ketiga di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

Sebagaimana pembangunan berlanjut, banyak daerah yang memiliki pasar potensial, sikap (attitude) dan akses terhadap modal, dan keterampilan membutuhkan penyelesaian pada permulaan industrialisasinya. Tahapan konvergensi antar daerah dalam struktur ekonomi, produktifitas dan pendapatan muncul. Konvergensi tersebut dapat menyebabkan kumulasi, karena migrasi sepertinya menjadi kurang selektif, dan kebijaksanaan Pemerintah negara menjadi kurang memenuhi sasaran/tujuan penyelenggaraan industrialisasi yang dimulai di seluruh negara dan menjadi lebih sensitive terhadap tekanan politis yang timbul dari ketidakmerataan (inequality) pendapatan.

#### **E. Perinsip Dasar Kegiatan Ekonomi/UKM sebagai pilihan yang terbaik dalam Pembangunan Wilayah.**

Banyak para pakar ekonomi yang memberikan dasar teori dalam kegiatan perekonomian. Pada dasarnya teori-teori ini mengacu pada bagaimana cara untuk dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Bangunan ekonomi sebagai pilihan terbaik dapat dilihat bagan dibawah ini :



Gambar 1 : Rancang Bangun Ekonomi Islami

Kelima nilai (keimanan, adil, tolok ukur, pemimpin dan hasil) menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan kegiatan ekonomi hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberikan dampak pada kahidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai yang universal tersebut, dibangunlah prinsip derivatif yang menjadi dasar dalam ekonomi termasuk pilihan kegiatan ekonomi wilayah. Ketiga prinsip itu adalah *multiple ownership*, *freedom to act* dan *social justice* (Jomo KS, 1993).

- a. ***Multitype Ownership*** (Kepemilikan Multijenis)  
 Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam sistem sosialis kepemilikan negara. Sedangkan dalam islam berlaku kepemilikan multijenis, yaitu mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau masyarakat. Dalam konteks ini bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan dan sifatnya sementara. Jadi manusia hanya pemilik sekunder. Dengan demikian hak kepemilikan harus bersifat adil. UKM harus menganut prinsip ini.
- b. ***Freedom to act*** (kebebasan berusaha)  
***Freedom to act*** bagi individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu mekanisme pasar adalah keharusan dalam islam. Dengan syarat tidak ada distorsi. Sebab distorsi akan menimbulkan nilai ketidakadilan.
- c. ***Social Justice*** (keadilan sosial)

Gabungan nilai pemimpin dan hasil melahirkan prinsip keadilan sosial. Pemerintah harus bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan miskin.

## F. Kesimpulan

Perkembangan dan perubahan wilayah sebagai akibat pertumbuhan, peranan perdagangan, pergerakan tenaga kerja dan modal, hubungan struktur perekonomian wilayah terhadap pertumbuhan dan konvergensi wilayah yang berbeda dalam hal income dan strukturnya.

Proses perubahan ekonomi wilayah yang berlangsung melalui berbagai pola keterkaitan, Secara umum adanya keterkaitan vertical menyebabkan pertumbuhan atas dasar penguatan diri sendiri (self reinforcing growth) atau kecenderungan menurun. Sedangkan keterkaitan horizontal memiliki pengaruh penstabilan, Berbagai teori mengenai kebangkitan perkembangan wilayah menekankan salah satunya yaitu permintaan terhadap output wilayah dan keterkaitan kebelakang, atau penawaran input dan keterkaitan kedepan.

Pendekatan sederhana ekonomi basis menunjukkan bahwa ekspor merupakan pendorong pertumbuhan suatu wilayah (sementara itu) non basis, atau layanan pasar local dan perilaku-prilaku diasumsikan tumbuh atau berkembang hanya dalam rangka merespon demand local yang dihasilkan oleh sector ekspor, dan kurang lebih juga untuk mempertahankan rasio tetap.

Model ekonomi regional yang menyatakan bahwa semua pertumbuhan dan perubahan berasal dari demand dan disebarkan melalui keterkaitan kebelakang adalah merupakan satu sisi. Suatu model yang lebih memadai menyerahkan peranana utama kepada factor suplai dan keterkaitan kedepan, sedangkan analisis IO kuang disesuaikan dengan baik untuk menghadapi perubahan yang datang dari sisi penawaran.

Perpindahan modal menjadi sasaran determinan-determinan yang sangat analog (sejalan) dengan hal itu juga mempengaruhi perpindahan tenaga kerja, walaupun pola bunga dan perbedaan gaji sangat berbeda, sebagaimana juga bentuk daripada aliran modal dan tenaga kerja.

Perdagangan antar wilayah dapat menyediakan sebagian substitusi bagi aliran modal dan tenaga kerja dalam keuntungan yang sama untuk kedua faktor tersebut. Aliran modal dan tenaga kerja juga dapat saling menggantikan atau melengkapi satu sama lain; (dimana) hubungan substitutif tersebut mempunyai pengaruh terhadap stabilitas daripada pertumbuhan wilayah yang bersangkutan, sedangkan hubungan komplementer dapat menjadi dasar self-reinforcing dan kecenderungan kumulatif.

*Retailing functions (zona I)* mempunyai lokasi pada pusat kota karena kelangsungan usaha koperasi dan UKM membutuhkan derajat aksesibilitas paling besar agar mendatangkan keuntungan maksimal.

Derajat aksesibilitas yang tinggi dimaksudkan untuk menarik *costumers*. Semakin tinggi derajat aksesibilitas, semakin tinggi pula

frekuensi beli karena semakin banyak costumers dan dengan sendirinya semakin besar keuntungan yang diperolehnya.

### Daftar Pustaka

Affendi Anwar, (2000). ***Perspektif Otonomi Daerah dan Federasi dalam Pembangunan Indonesia Masa Depan***. Semiloka IPB-BPS Jakarta.

Affendi Anwar, (2002). ***Konsep Pengukuran Tingkat Kesejahteraan***. IPB Bogor.

Affendi Anwar, (2000/2001). ***Kerangka Ekonomi Fundamental dalam Menghadapi Masalah Prngelolaan Sumberdaya Lahan*** IPB Bogor.

Affendi Anwar, (2002). ***Pengambilan Keputusan Kolektif; Dalam Menempuh Cara Penyediaan Public Good***. IPB Bogor.

Adiwarman.A.Karim (2001). ***Sistem Ekonomi Islam***. Makalah.

Clifford S.Russell and Norman K,Nicholson. (1981). ***Public Choice and Rural Development***. Resources for The Future Washington DC.

DepPerIndag (2001). ***Perspektif Hubungan Perdagangan Luar Negeri Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Ekspor Hasil UKM dan Koperasi***.Deperindag-Jakarta.

Edgar M.Hoover (1985). ***Regional Economics***. An Introduction, Third Edition. New York.

Joe.B.Stevens (1993). ***The Economics of Collective Choice***. Westview Press. Boulder-San Fransisco-Oxford.

Jomo, K.S (1993). ***Islamic Ekonomi Alternatives, Critical Persepctives and New Directions***.Kuala Lumpur, Ikraq.